

ANALISIS TERHADAP PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI SEBAGAI MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PADA SMAN 1 DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA

¹ Nan Rahminawati, ² Yulis Sulistiana

^{1,2} *Fakultas Tarbiyah Prodi Magister Pendidikan Islam, Unisba, Jl. Ranga Gading, Bandung 40116*
e-mail: ¹ nan_rahminawati@unisba.ac.id, yulisdewi@gmail.com

Abstrak. Pendidikan merupakan program pembelajaran yang diupayakan ke arah pengembangan pengetahuan, watak, dan keterampilan siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu respon dari perkembangan dinamika dalam proses pendidikan adalah Peraturan Bupati Purwakarta No. 37 tahun 2011 yang menjadikan Pendidikan Budi Pekerti sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah Purwakarta. Tujuan penelitian ini adalah ingin memperoleh data tentang komponen-komponen, langkah-langkah yang ditempuh, dan bentuk perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran Budi Pekerti sebagai mata pelajaran muatan lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, serta studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah: komponen-komponen, langkah-langkah, dan bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti sebagai mata pelajaran muatan lokal di SMAN 1 Darangdan, Purwakarta sudah disiapkan dan dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pembelajaran.

Kata kunci: Rencana Pembelajaran, Mata Pelajaran Budi Pekerti, dan Muatan Lokal

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan yang berfungsi melahirkan generasi bangsa yang terasah pontensinya, memiliki kecerdasan lahir batin, dan berbudi pekerti luhur sehingga berguna baik bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan Negara. Saat ini, dunia pendidikan dinilai kurang berhasil menghantarkan generasi bangsa menjadi pribadi-pribadi bermartabat. Pendidikan bukan hanya untuk mengejar nilai dan kelulusan, namun yang terpenting adalah untuk mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta perbaikan sikap dan pikir yang sesuai dengan agama, etika, dan kaidah yang berlaku. Kenyataan yang ada, seolah-olah nilai itulah yang menentukan keberhasilan, padahal jika tidak ditunjang budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan tidak berarti sama sekali. Pendidikan seharusnya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik serta peradaban bangsa yang bermartabat. Hal ini dilakukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan UUD 1945 alinea 4.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bupati Purwakarta meresponnya dengan suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati Purwakarta No. 37 tahun 2011 yang di *launcing* pada tanggal 22 November 2011, yang isinya terkait penetapan Pendidikan Budi Pekerti sebagai mata pelajaran muatan lokal di setiap satuan pendidikan.

Pendidikan Budi Pekerti diharapkan mampu menjawab semua harapan perbaikan budi pekerti para siswa dan sebagai pemantapan atas Pendidikan Karakter yang selama beberapa tahun ini sudah berjalan secara terintegratif dalam setiap mata pembelajaran. Pendidikan Karakter yang terintegratif ini merupakan program nasional

yang harus dilaksanakan oleh semua sekolah di Indonesia sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat bagi perbaikan moral bangsa. Sebagai muatan lokal, Pendidikan Budi Pekerti akan mendapat perhatian penuh seperti halnya mata pelajaran lainnya. Guru yang kompeten, silabus yang sesuai, sarana-prasarana yang mendukung, dan evaluasi yang akan menjadi acuan berhasil tidaknya pembelajaran pendidikan budi pekerti akan disiapkan dengan matang. Hasil evaluasi yang masuk ke dalam nilai rapor akan membuat berbagai pihak lebih serius dan konsentrasi menyikapi pembelajaran budi pekerti dibanding dengan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan cukup baik. Untuk itu, maka perlu dipersiapkan dengan seoptimal mungkin.

2. Pembahasan

Sebagai bentuk persiapan, perencanaan pembelajaran sangat penting sebab akan menentukan keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Ibrahim (2010: 7-8) berpendapat bahwa *“Perencanaan Pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, penentuan materi yang akan disampaikan, pemilihan alat atau media apa yang diperlukan, pelaksanaan pembelajaran, serta penentuan dan penyusunan alat evaluasi.”*

Implementasi Peraturan Bupati merupakan keniscayaan untuk diperhatikan semua satuan pendidikan yang ada di kabupaten Purwakarta. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan, SMAN 1 Darangdan yang terletak di perbatasan kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta, merupakan sekolah yang relatif siap untuk melaksanakan Perbup dimaksud. Indikasi kesiapan sekolah ditandai dengan terselenggaranya persiapan yang dilakukan pihak sekolah, antara lain menyelenggarakan workshop dan pembahasan secara intensif antara guru-guru yang terkait dan ditetapkan sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti. Berdasarkan data empirik tersebut, dipandang perlu untuk dikaji *“Analisis terhadap Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal pada SMAN 1 Darangdan, Kabupaten Purwakarta.”*

Berdasarkan latar terbelakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Komponen-komponen apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti sebagai mata pelajaran muatan lokal pada SMAN 1 Darangdan, Kabupaten Purwakarta? (2) Langkah-langkah apa yang harus ditempuh dalam perencanaan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti sebagai mata pelajaran muatan lokal pada SMAN 1 Darangdan, kabupaten Purwakarta? (3) Bentuk perencanaan pembelajaran apa yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti sebagai mata pelajaran muatan lokal pada SMAN 1 Darangdan, Kabupaten Purwakarta?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (Satori, 2009: 24) bahwa yang dimaksud dengan *“penelitian kualitatif adalah suatu proses inquiry tentang pemahaman berdasar pada tradisi-tradisi metodologis terpisah.”* Peneliti membangun suatu kompleks, gambaran holistik, meneliti fakta-fakta di lapangan, laporan-laporan yang ada dan tersusun, pandangan-pandangan dari penutur asli serta melakukan studi dalam suatu pengaturan yang alami. Sedangkan Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah dengan melakukan pengamatan, wawancara secara terbuka dan mendalam, serta studi literatur.

Kajian teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini meliputi (1) Komponen-Komponen yang mendukung Perencanaan Pembelajaran Pendidikan

Budi Pekerti, (2) Langkah-langkah dalam Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti, dan (3) Bentuk perencanaan yang disiapkan.

Husni Rahim (2001: 38) menyatakan bahwa:

Pendidikan Budi Pekerti sesuai dengan apa yang tercermin dalam tujuan nasional pendidikan Indonesia yakni tercapainya kualitas manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki 10 kriteria, yaitu: (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Berbudi pekerti luhur, (3) Memiliki pengetahuan, (4) Memiliki ketrampilan, (5) Memiliki kesehatan jasmani, (6) Memiliki kesehatan rohani, (7) Memiliki kepribadian yang mantap, (8) Memiliki kepribadian yang mandiri, (9) Memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, dan (10) Memiliki rasa kebangsaan.

Sebagai bagian penting dalam pembelajaran, suatu perencanaan hendaknya memperhatikan berbagai komponen yang meliputi (1) kurikulum, baik nasional, maupun muatan lokal, yang merupakan panduan sentral sebagai standar isi suatu pembelajaran, (2) silabus pembelajaran, biasanya disusun oleh para guru mata pelajaran yang sama untuk menyamakan persepsi dari pengejawantahan standar isi kurikulum, dan (3) adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), disusun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran dari silabus yang sudah dirumuskan.

Hidayat (Abdul Majid 2011: 21) mengungkapkan bahwa komponen-komponen yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran antara lain: (1) Memahami kurikulum, (2) Menguasai bahan ajar, (3) Menyusun program pembelajaran, (4) Melaksanakan program pembelajaran, dan (5) Menilai program pembelajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dengan demikian rencana pembelajaran yang telah tersusun yang berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) akan sesuai seperti yang ditetapkan sebelumnya. Ketercapaian hasil dari suatu rencana pembelajaran dapat kita lihat pada hasil akhir pembelajaran yang berupa penilaian/evaluasi, yaitu penilaian di setiap akhir pembelajaran.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti, Rae (2005: 174-177) mengemukakan bahwa: “perencanaan dalam pembelajaran harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu (1) sasaran yang ditetapkan/disepakati, (2) mempertimbangkan populasi yang akan belajar, (3) membuat daftar cara-cara yang dapat dilakukan (metode) untuk mencapai tujuan/sasaran, (4) tetapkan pendekatan apa yang paling tepat untuk setiap pembelajaran, (5) mempertimbangkan sejauh mana pengaruh bagi pembelajar, (6) memberi penegasan akan batasan-batasan materi pembelajaran untuk periode-periode tertentu, (7) menentukan alokasi waktu untuk setiap pembelajaran, lalu (8) diakhiri dengan rancangan pelatihan/evaluasi.”

Bentuk perencanaan pembelajaran diwujudkan dalam suatu kurikulum. Kurikulum adalah acuan utama dalam penyusunan perencanaan suatu program pembelajaran, namun kondisi sekolah, lingkungan sekitar, kondisi siswa serta guru merupakan hal yang pokok untuk diperhatikan. Lalu kemudian dari kurikulum (nasional atau muatan lokal) akan dikembangkan dalam silabus dan diperinci menjadi panduan dalam mengajar yaitu RPP. Zuriyah (2008: 89) menyatakan bahwa, “Guru mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti harus mengacu pada kurikulum yang ditetapkan, menyusun silabus, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).” Kurikulum nasional disusun oleh pemerintan pusat, sedangkan kurikulum muatan lokal disusun oleh pemerintah daerah yang berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus dan RPP akan dikembangkan dan disusun para guru di sekolah dari kurikulum tersebut.

Bentuk silabus dan RPP dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
FORMAT SILABUS

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu (menit)	Sumber Bahan/ Alat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Tabel 2
BENTUK RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran	:
Kelas/Semester	:
Pertemuan Ke-	:
Alokasi Waktu	:
Standar Kompetensi	:
Kompetensi Dasar	:
Indikator	:
I. Tujuan Pembelajaran	:
II. Materi Ajar	:
III. Metoda Pembelajaran	:
IV. Langkah-langkah Pembelajaran	:
a. Kegiatan Awal	:
b. Kegiatan Inti	:
c. Kegiatan Akhir	:
V. Alat/Bahan/Sumber Belajar	:
VI. Penilaian	:

Berdasarkan metoda dan teknik yang digunakan, diperoleh hasil bahwa: (1) komponen-komponen yang disiapkan dalam perencanaan pembelajaran Budi Pekerti sebagai Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD). Ternyata pada pelaksanaan di lapangan, penyiapan kurikulum muatan lokal yang berisi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) yang seharusnya sudah diluncurkan oleh Dinas Pendidikan Purwakarta mengalami beberapa hambatan, diantaranya (a) belum ada kekeluasan waktu untuk mengumpulkan kembali para guru PKN SMA/SMK se-Purwakarta yang hadir pada acara workshop tanggal 18 Juni 2012 yang lalu, (b) banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, (c) pergantian pejabat kasi kurikulum dan kesiswaan di Disdik Purwakarta, dan (d) banyaknya pertimbangan khusus bagi pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti sebagai mata pembelajaran baru.

Kalau memperhatikan pemenuhan terhadap komponen-komponen SKKD sebagai bagian dasar pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti (PBP), maka hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Ibrahim dan Syaodih (2010: 54-65) bahwa *"komponen-komponen yang harus disiapkan dalam perencanaan program pembelajaran adalah (1) kurikulum, (2) silabus yang akan memuat: kondisi sekolah, kemampuan dan perkembangan siswa, guru, beserta materi, media, dan evaluasi, dan (3) RPP yang merupakan pengembangan dari silabus tersebut."* Demikian juga pendapat Hidayat (Abdul Majid 2011: 21) yang mengungkapkan bahwa komponen-komponen yang harus

dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran antara lain: “(1) Memahami kurikulum, (2) Menguasai bahan ajar, (3) Menyusun program pembelajaran, (4) Melaksanakan program pembelajaran, dan (5) Menilai program pembelajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan”.

Kurikulum ini disusun oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Purwakarta yaitu SKKD yang merupakan standar isi yang akan memberikan petunjuk standar bagi pembelajaran PBP untuk semua sekolah di Purwakarta. Kurikulum merupakan bagian penting yang akan memandu kejelasan arah pembelajaran pendidikan budi pekerti yang baru dimulai pada semester ganjil tahun ajaran 2012/2013 di SMAN 1 Darangdan. Untuk mendukung pembelajaran PBP, sekolah segera mengantisipasi persiapan bagi terselenggaranya pembelajaran yaitu dengan menyusun silabus dan RPP PBP berdasarkan lima unsur/point penting yang terdapat dalam standar kompetensi dalam lembar hasil belajar siswa dari Disdik Purwakarta, yaitu: (1) nilai spiritual, (2) perilaku yang terpuji, (3) kesadaran hukum dan tanggung jawab, (4) kemandirian dan kreativitas, serta (5) Nilai sosial dan budaya.

Dimulai dengan pembicaraan secara menyeluruh bersama semua guru mengenai persiapan pembelajaran PBP dalam suatu rapat kerja pada akhir tahun ajaran 2011/2012. Pada saat raker tersebut, disosialisasikan segala persiapan dan dikondisikan kesiapan sekolah yang mengharuskan adanya kerjasama semua *stakeholder* sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran PBP. Secara teknik, wakasek urusan kurikulum dan kesiswaan membentuk suatu tim guru mata pelajaran serumpun untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan pembelajaran PBP. Tim terbentuk atas guru-guru PAI, PKN, dan BK. Pembentukan tim ini dengan asumsi bahwa materi dalam PBP merupakan materi pembelajaran yang serumpun dan bisa diadaptasi dari ketiga mata pelajaran tersebut. Tujuannya adalah menghindari *overlapping* materi bagi siswa, serta memunculkan ketidakefektifan dalam mempelajari materi di kelas. Para guru berdiskusi menentukan segala komponen penting yang menunjang silabus dan RPP PBP.

Silabus Pendidikan Budi Pekerti merupakan garis besar atau pokok-pokok isi pembelajaran. Silabus merupakan perencanaan pembelajaran yang dikembangkan dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, namun cakupannya masih luas. Biasanya silabus disusun dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Hal ini senada dengan pendapat Majid (2011: 38) bahwa *Silabus merupakan produk pengembangan kurikulum yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai target tersebut.*

Langkah pertama yang dilakukan para guru di SMAN 1 Darangdan adalah dengan menganalisis kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah. Lingkungan sekolah adalah keadaan dan kondisi yang berhubungan dengan internal sekolah, antara lain, kesiapan guru, kesiapan siswa, dan sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan lingkungan luar sekolah adalah kondisi dan situasi orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Rae (2005: 174-177) mengemukakan bahwa perencanaan dalam pembelajaran harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: “(1) Sasaran Yang Ditetapkan/Disepakati, (2) Mempertimbangkan Populasi Yang Akan Belajar, (3) Membuat Daftar Cara-Cara Yang Dapat Dilakukan (Metode) Untuk Mencapai Tujuan/ Sasaran, (4) Tetapkan Pendekatan Apa Yang Paling Tepat Untuk Setiap Pembelajaran, (5) Mempertimbangkan Sejauh Mana Pengaruh Bagi Pembelajar, (6) Memberi Penegasan Akan Batasan-Batasan Materi Pembelajaran

Untuk Periode-Periode Tertentu, (7) Menentukan Alokasi Waktu Untuk Setiap Pembelajaran, dan (8) Diakhiri Dengan Rancangan Pelatihan/Evaluasi”.

Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti harus jelas dalam menetapkan pendekatan apa yang paling tepat, karena merupakan mata pelajaran baru dan kejelasan lebih lanjut masih menanti instruksi dari Disdik Purwakarta. Yang sekarang tersedia dilakukan semaksimal mungkin dengan pendekatan psikologis agar siswa akan terbentuk menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, misalnya kejujuran sudah mengakar dalam kepribadiannya sehingga ketika ditanya akan menjawab sejujurnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari guru bahwa sebagian besar siswa sudah terbiasa dengan sifat jujur, contohnya ketika ditanya, apakah siswa melaksanakan solat subuh?. Para siswa pun ada yang secara jujur mengakui kalau dia tidak melakukan solat subuh. Kemudian guru meluruskan dan memberi pengertian mengenai kewajiban muslim dalam melaksanakan solat. Namun untuk sikap kejujuran itu, siswa tersebut akan mendapat apresiasi positif.

Pendekatan psikologis dilakukan untuk mengungkap ketepatan siswa ketika masuk sekolah. Ada teguran bagi siswa yang terlambat. Namun, ada kasus-kasus tertentu yang mendapat perhatian mengenai alasan keterlambatan siswa, misalnya siswa yang terlambat ternyata karena menolong orang yang mendapat kecelakaan di jalan hingga mengantarkannya ke rumah sakit. Keterlambatan ini dimaklumi, dan sikap terpuji siswa tersebut mendapat penilaian tersendiri dari guru.

Langkah selanjutnya adalah memberi penegasan akan batasan-batasan materi pembelajaran untuk periode-periode tertentu. Materi dalam Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti sangat beragam dan masih serumpun dengan PAI, PKN, dan BK. Oleh karena itu, SMAN 1 Darangdan menyikapinya dengan membentuk guru-guru pengampu mata pelajaran serumpun dalam suatu tim yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran PBP terutama dalam materi pembelajarannya. Hal ini adalah untuk mengantisipasi tumpang tindihnya materi yang akan diajarkan di kelas. Artinya yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan arah Bimbingan karir bisa disesuaikan dan diatur sedemikian rupa sehingga materi tidak membuat jenuh siswa. Kalaupun materi disampaikan dengan tujuan memberi pemantapan/pengulangan maka dilakukan dengan peningkatan dari materi sebelumnya.

Kemudian pembiasaan ini dipantau ketat oleh seluruh komponen di sekolah. Pemotivasian adalah bagaimana guru memberi motivasi kepada siswa, misalnya siswa yang malas mengaji, Guru akan melakukan pendekatan dengan baik dengan menganalisis penyebab-penyebabnya. lalu memberi siswa tersebut dimotivasi sehingga mau belajar mengaji. Peneladanan adalah bagaimana guru bisa menjadi suri teladan terhadap para siswa di sekolah. Hal ini bagian dari perencanaan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan para guru sehingga semua *stakeholder* mampu memberi contoh budi pekerti yang baik bagi para siswa. Bahkan kepala sekolah sudah merencanakan bahwa setiap guru memiliki keharusan memberikan kuliah tujuh menit (kultum) kepada siswa, bukan hanya tugas guru PAI atau kepala sekolah saja.

Menentukan alokasi waktu untuk pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti yaitu 1 jam pelajaran tatap muka merupakan langkah berikutnya yang dilakukan. SMAN 1 Darangdan sudah memiliki 3 mata pelajaran muatan lokal (mulok) yaitu Basa Sunda untuk 2 jam mata pelajaran tatap muka, Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan 1 mata pelajaran tatap muka, dan sekarang ada tambahan 1 jam pelajaran tatap muka untuk PBP. Penentuan ini sudah berdasarkan instruksi dari Disdik Purwakarta dengan

pengaturan teknisnya oleh wakasek urusan kurikulum dan kesiswaan di SMAN 1 Darangdan atas pengawasan kepala sekolah.

Langkah terakhir yang dilakukan adalah menyusun rancangan pelatihan/ evaluasi. Evaluasi pembelajaran PBP dilakukan dengan tes untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan materi PBP. Seperti halnya pelajaran lain, materi PBP juga akan diadakan tes tengah dan akhir, juga Ujian Keterampilan Khusus (UKK). Penilaian yang dilakukan untuk mata pelajaran PBP adalah melalui sikap dan perilaku yang ditampilkan para siswa. Seperti halnya sudah dilaksanakan dalam BK, penilaian skala sikap adalah salah satu bentuk penilaian siswa. Untuk penilaian praktik berbudi pekerti siswa, semua *stakeholder* memiliki catatan semua siswa di SMAN 1 Darangdan. Dalam catatan itu akan tertulis semua tingkah laku baik yang positif maupun yang negatif, baik yang dilakukan siswa di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan luar sekolah, misalnya ketika berpacaran di kendaraan umum, informasi dari orang tua, dan sebagainya.

Bentuk perencanaan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti yang dipersiapkan sama dengan mata pembelajaran lainnya, yaitu (1) Kurikulum mulok yang berisi SKKD Pendidikan Budi Pekerti sebagai standar isi pembelajaran muatan lokal daerah Purwakarta, (2) Silabus Pendidikan Budi Pekerti, dan (3) RPP Pendidikan Budi Pekerti

Para guru di SMAN 1 Darangdan memiliki komitmen yang tinggi bagi terselenggaranya pembelajaran pendidikan Budi Pekerti sebagai mata pelajaran tersendiri. Sebagai mata pembelajaran baru, PBP memerlukan pemikiran akurat dan mendalam, terutama dalam penyajian, materi pembelajaran, serta penilaiannya. Para guru yang berada di SMAN 1 Darangdan dilibatkan dalam penyusunan perencanaan PBP ini, terutama yang paling dominan berperan adalah tim guru pelajaran yang serumpun, yang disempurnakan guru mata pelajaran dengan penanggung jawab kepala sekolah. Secara teknis, wakasek urusan kurikulum dan kesiswaan sangat berperan dalam kelancaran dan keberlangsungan mata pelajaran PBP di SMAN 1 Darangdan. Wakasek urusan kurikulum dan kesiswaan bertanggung jawab sebagai jembatan informasi antara guru di sekolah dengan Disdik Purwakarta, merancang dan menjadwalkan serta mengatur kegiatan PBP untuk menjadi mata pelajaran tersendiri, serta memberi masukan-masukan positif baik dalam hal materi maupun praktiknya sehari-hari.

Penyusunan kurikulum muatan lokal yang berisi SKKD, silabus dan RPP Pendidikan Budi Pekerti sangat penting karena merupakan bentuk perencanaan pembelajaran yang diperlukan guru dalam mengajar di kelas. Bentuk perencanaan ini merupakan pedoman dan panduan guru dalam menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini agar pembelajaran terarah, tidak tumpang tindih dalam materi, guru memakai metode yang tepat, serta mampu mengukur segala sesuatu yang harus terukur. Dengan hal tersebut, tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. SMAN 1 Darangdan sudah memiliki perencanaan pembelajaran PBP sebagai pedoman bagi pembelajaran PBP di kelas dan dalam praktik keseharian, yaitu silabus dan RPP PBP. Sedangkan untuk kurikulum muatan lokal yang memuat SK-KD sampai saat ini belum tersedia dan masih menanti kelanjutan hasil dari workshop yang sudah dilaksanakan pada hari Senin, 18 Juni 2012.

Berdasarkan hasil temuan data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Komponen-komponen dan bentuk perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan dalam Pendidikan Budi Pekerti sama saja dengan pembelajaran lainnya, meliputi kurikulum muatan lokal, silabus & RPP. Namun untuk sementara silabus & RPP dikembangkan dari 5 point penting yang dikeluarkan Disdik Purwakarta sampai kurikulum muatan lokal yang terdiri atas Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) disusun.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan mata pelajaran PBP adalah dengan menyiapkan guru yang akan menjadi guru bidang studi Pendidikan Budi Pekerti, mengkondisikan semua *stakeholder* sekolah untuk mendukung PBP, membentuk Tim penyusun perencanaan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti, menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung, merencanakan media yang terbaik, metode yang tepat, materi yang komprehensif, serta penilaian/evaluasi yang efektif.

Adapun bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti yaitu kurikulum muatan lokal yang terdiri atas Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD), silabus, dan RPP Pendidikan Budi Pekerti.

3. Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim & Nana Syaodih. (2010) *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Majid, Abdul. (2011). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujib, Abdul & Jusuf Mudzakkir. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur'aeni, Nunung. (2012). *Memahami Pentingnya Budi Pekerti*. Purwakarta: Dinas Pendidikan Purwakarta.
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 tahun 2011 tentang pendidikan budi pekerti sebagai mata pelajaran/bidang studi muatan lokal pada setiap satuan pendidikan di kabupaten Purwakarta.
- Rae, Leslie. (2005). *Perencanaan Efektif*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- _____. (2008). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20. 2003. Jakarta: Tamita Utama.
- Zuriah, Nurul. (2008). *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara.